



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EDISON**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **461991**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 14.180.192.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 719 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.274.068.000
2. Tanah Seluas 579 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 173.700.000
3. Tanah Seluas 2.617 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.637.324.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1.277 m2 di KAB / KOTA KOTA PRABUMULIH , HASIL SENDIRI Rp. 383.100.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 16.830 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 6.732.000.000
7. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
8. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 505.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	705.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	500.000.000
Sub Total	Rp.	16.030.192.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 16.030.192.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.